

## PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Bambang Arianto<sup>1</sup>, Gema Ika Sari<sup>2</sup>

Universitas Banten<sup>1</sup>

Universitas Bina Bangsa<sup>2</sup>

[ariantobambang2025@gmail.com](mailto:ariantobambang2025@gmail.com)<sup>1</sup>; [gemaikasari@gmail.com](mailto:gemaikasari@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. Hal itu disebabkan *fraud* pada sektor publik masih menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan tata kelola anggaran, akuntabilitas pelayanan publik, integritas birokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan melibatkan 35 responden yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan, audit internal, pengawasan, dan administrasi pada organisasi sektor publik. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM PLS) dengan aplikasi SmartPLS untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntansi forensik terhadap pencegahan *fraud*, sementara akuntansi forensik juga berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Selain itu akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini juga menegaskan bahwa semakin baik penerapan akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal, maka semakin baik pula kemampuan organisasi sektor publik dalam mencegah potensi *fraud*.

**Kata Kunci:** Akuntansi Forensik, Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan *Fraud*

**Abstract:** This study aims to examine the effect of forensic accounting and internal control systems on fraud prevention in public sector organizations. Fraud in the public sector remains a critical issue because it is directly related to budget governance, public service accountability, bureaucratic integrity, and public trust in government institutions. This study employed a quantitative approach using a survey method involving 35 respondents who were associated with financial management, internal auditing, supervision, and administration in public sector organizations. The data were analyzed using *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) with the SmartPLS application to examine the influence of the independent variables on fraud prevention in public sector organizations. The findings indicate that forensic accounting has an effect on fraud prevention, while forensic accounting also affects the internal control system. In addition, forensic accounting and internal control systems each have a positive effect on fraud prevention. This study further confirms that the better the implementation of forensic accounting and internal control systems, the greater the ability of public sector organizations to prevent potential fraud.

**Keywords:** Forensic Accounting, Internal Control System, Fraud Prevention

## Pendahuluan

*Fraud* (kecurangan) pada organisasi sektor publik merupakan persoalan serius yang dapat melemahkan kualitas tata kelola pemerintahan, merugikan keuangan negara, menurunkan efektivitas pelayanan publik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Putri & Retnosari, 2023). Sementara, organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, tata kelola anggaran sektor publik masih menghadapi berbagai risiko kecurangan, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi dokumen pertanggungjawaban, *mark-up* pengadaan, pembayaran fiktif, penyimpangan perjalanan dinas, penggelapan aset, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi dan keuangan (Maemunah & Utami, 2026). *Fraud* dalam sektor publik tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada legitimasi organisasi sektor publik. Ketika *fraud* terjadi, masyarakat dapat memandang bahwa organisasi publik tidak mampu menjalankan amanah tata kelola sumber daya secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut dapat memperlemah kepercayaan publik, menurunkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan persepsi negatif terhadap aparat pemerintah (Awaliah, 2023). Oleh karena itu, pencegahan *fraud* menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola sektor publik.

Pencegahan *fraud* merupakan upaya sistematis untuk mengurangi peluang, tekanan, dan rasionalisasi yang dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan. Dalam perspektif organisasi sektor publik, pencegahan *fraud* tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan formal. Pencegahan *fraud* membutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif, budaya integritas, pengawasan yang memadai, serta kemampuan mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini (Hanif & Nadhifah, 2025). Salah satu pendekatan yang semakin relevan dalam pencegahan *fraud* adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan penerapan ilmu akuntansi, audit, investigasi, dan analisis bukti untuk mengidentifikasi, menelusuri, dan membuktikan indikasi kecurangan atau penyimpangan keuangan (Simbolon & Kuntadi, 2022). Dalam organisasi sektor publik, akuntansi forensik berperan penting untuk menelusuri transaksi yang tidak wajar, menguji dokumen pertanggungjawaban, menganalisis pola pengeluaran, memeriksa hubungan antar pihak, serta menghitung potensi kerugian. Akuntansi forensik tidak hanya digunakan ketika *fraud* telah terjadi, tetapi juga dapat digunakan sebagai pendekatan pencegahan melalui identifikasi *red flags* dan penguatan mekanisme pemeriksaan berbasis risiko (Kaur et al., 2023).

Selain akuntansi forensik, sistem pengendalian internal juga memiliki peran penting dalam pencegahan *fraud* (Batubara, 2020). Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efektivitas operasi, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks sektor publik, sistem pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mempersempit peluang *fraud* karena setiap transaksi memiliki mekanisme otorisasi, dokumentasi, verifikasi, pemisahan tugas, dan pengawasan (Putri, 2025). Permasalahan yang sering muncul dalam organisasi sektor publik adalah adanya kesenjangan antara keberadaan aturan pengendalian dan efektivitas implementasi di lapangan. Suatu organisasi dapat memiliki prosedur tertulis yang memadai, tetapi *fraud* tetap terjadi apabila prosedur tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Pemisahan tugas dapat diatur secara formal, tetapi satu orang masih dapat mengusulkan, memverifikasi, dan menyetujui transaksi karena keterbatasan sumber daya manusia atau lemahnya pengawasan. Sementara, dokumen pertanggungjawaban dapat terlihat lengkap secara administratif, tetapi belum tentu mencerminkan kegiatan yang benar-benar terjadi.

Dalam kondisi tersebut, akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal perlu dipahami sebagai dua variabel yang saling melengkapi. Akuntansi forensik berperan dalam memperkuat kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi indikasi *fraud*, menelusuri bukti, dan menganalisis transaksi. Sistem pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pencegahan yang membatasi peluang terjadinya *fraud* sejak awal (Nadirisyah et al., 2024). Kombinasi keduanya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. Penelitian ini penting dilakukan karena organisasi sektor publik memerlukan pendekatan pencegahan *fraud* yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis dan berbasis bukti. Akuntansi forensik memberikan

kemampuan investigatif, sedangkan sistem pengendalian internal memberikan kerangka pengendalian yang sistematis. Dengan menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pencegahan *fraud*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola sektor publik yang lebih akuntabel dan berintegritas (Cicchini et al., 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah menegaskan bahwa akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* terutama berkontribusi terhadap pencegahan dan deteksi *fraud* melalui identifikasi indikasi penyimpangan, penelusuran transaksi mencurigakan, dan penguatan bukti investigative (Kaur et al., 2023). Selain itu, peran akuntansi forensik tidak hanya terletak pada proses pembuktian *fraud*, tetapi juga pada peningkatan tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas organisasi (Su'un & Abduh, 2025). Sementara aspek lain menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada sektor publik melalui mekanisme otorisasi, dokumentasi, verifikasi, pemisahan tugas, dan pengawasan (Nadirsyah et al., 2024). Dapat dikatakan bahwa mayoritas penelitian terdahulu lebih fokus mengelaborasi akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal secara terpisah. Sementara keseimbangan penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang menguji pengaruh simultan kedua variabel tersebut terhadap pencegahan *fraud* dalam organisasi sektor publik. Dengan begitu, kebaruan penelitian ini terletak pada Upaya integrasi akuntansi forensik sebagai pendekatan investigatif preventif dengan sistem pengendalian internal sebagai mekanisme tata kelola untuk memperkuat pencegahan *fraud* sektor publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama. *Pertama*, apakah akuntansi forensik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. *Kedua*, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. *Ketiga*, apakah akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik.

## Landasan Teori

### Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada pemeriksaan transaksi, dokumen, catatan keuangan, dan bukti lain untuk mengungkap indikasi *fraud* atau penyimpangan. Akuntansi forensik menggabungkan kompetensi akuntansi, auditing, investigasi, hukum, analisis data, dan komunikasi temuan. Dalam praktik sektor publik, akuntansi forensik sangat penting karena tata kelola keuangan publik memiliki risiko penyalahgunaan yang tinggi apabila tidak didukung oleh pengawasan yang memadai (Bierstaker et al., 2006). Akuntansi forensik berbeda dari akuntansi keuangan karena tidak hanya bertujuan menyusun atau membaca laporan keuangan, tetapi juga menelusuri kebenaran di balik transaksi. Akuntansi forensik digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah suatu transaksi benar terjadi, apakah dokumen pendukung valid, apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan tidak sah, dan apakah terdapat kerugian yang dapat dihitung. Oleh karena itu, akuntansi forensik sangat berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi *red flags fraud*. Dalam organisasi sektor publik, akuntansi forensik dapat diterapkan pada berbagai area, seperti pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, bantuan sosial, belanja modal, pengelolaan aset, hibah, dan dana operasional. Pada area pengadaan, akuntansi forensik dapat digunakan untuk menelusuri vendor terafiliasi, dokumen penawaran yang mirip, harga tidak wajar, atau pembayaran kepada pihak yang tidak sah. Pada arena entitas bisnis, akuntansi forensik dapat digunakan untuk menguji keabsahan bukti pertanggungjawaban, *invoice*, kuitansi, dan dokumen pendukung (Kaur et al., 2023). Akuntansi forensik juga berperan dalam pencegahan *fraud* karena pendekatan ini dapat meningkatkan kesadaran organisasi terhadap potensi penyimpangan. Ketika aparaturnya mengetahui bahwa transaksi dapat ditelusuri secara forensik, peluang melakukan *fraud* dapat menurun. Selain itu, akuntansi forensik membantu organisasi menyusun sistem peringatan dini berdasarkan pola transaksi tidak wajar (Cicchini et al., 2026).

### Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan melalui pengelolaan risiko, pengamanan aset, keandalan pelaporan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam sektor publik, sistem pengendalian internal

sangat penting karena organisasi publik mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sistem pengendalian internal mencakup beberapa unsur penting. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan integritas, etika, struktur organisasi, komitmen pimpinan, dan tanggung jawab aparatur. Penilaian risiko berkaitan dengan kemampuan organisasi mengidentifikasi risiko *fraud* dan menentukan respons yang tepat (Putri, 2025). Aktivitas pengendalian mencakup otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas, pengamanan aset, dan dokumentasi. Informasi dan komunikasi berkaitan dengan penyampaian data yang akurat dan tepat waktu. Pemantauan berkaitan dengan evaluasi berkelanjutan atas efektivitas pengendalian. Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi peluang *fraud* karena setiap transaksi harus melalui prosedur yang jelas. Pembayaran tidak dapat dilakukan tanpa bukti pendukung, pengadaan tidak dapat dilakukan tanpa proses pemilihan yang sah, dan perubahan data keuangan tidak dapat dilakukan tanpa otorisasi. Sebaliknya, pengendalian internal yang lemah dapat menciptakan kesempatan *fraud*, terutama apabila terdapat akses yang tidak terbatas, dokumen yang tidak diverifikasi, atau pengawasan yang tidak berjalan. Dalam sektor publik, sistem pengendalian internal juga berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik (Nadirisyah et al., 2024). Publik, akan lebih percaya kepada organisasi publik apabila pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme yang tertib, transparan, dan dapat diaudit. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga bagian dari tata kelola publik yang berintegritas.

### **Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Sektor Publik**

Pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, aset, dan program publik. Pencegahan *fraud* lebih baik daripada penindakan setelah *fraud* terjadi karena kerugian yang muncul sering sulit dipulihkan sepenuhnya. Pencegahan *fraud* juga dapat mengurangi biaya investigasi, menjaga reputasi organisasi, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penguatan pengendalian internal, peningkatan integritas aparatur, penerapan akuntansi forensik, pemanfaatan teknologi audit, peningkatan transparansi, pengawasan internal, pelaporan pelanggaran, dan audit berbasis risiko (Khafifah et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, pencegahan *fraud* dipandang sebagai kemampuan organisasi untuk mencegah manipulasi dokumen, penyalahgunaan anggaran, penggelapan aset, transaksi fiktif, konflik kepentingan, dan penyimpangan dalam proses pengadaan atau pembayaran. Pencegahan *fraud* memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pimpinan organisasi harus membangun budaya integritas. Unit keuangan harus memastikan setiap transaksi memiliki dokumen yang sah. Pengawas internal harus melakukan pemantauan dan evaluasi serta aparatur harus menjalankan tugas sesuai prosedur. Dengan demikian, pencegahan *fraud* merupakan proses kolektif yang membutuhkan sistem dan perilaku organisasi yang baik (Wulandari, 2024).

### **Akuntansi Forensik dan Pencegahan *Fraud***

Akuntansi forensik memiliki hubungan erat dengan pencegahan *fraud* karena pendekatan ini membantu organisasi mengenali indikasi kecurangan secara lebih dini. Akuntansi forensik memungkinkan auditor atau aparatur pengawas menelusuri transaksi tidak wajar, menguji kelengkapan dokumen, membandingkan data antar sumber, dan menyusun analisis berbasis bukti (Su'un & Abduh, 2025). Semakin baik penerapan akuntansi forensik, semakin besar peluang organisasi untuk mencegah *fraud* sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Akuntansi forensik juga meningkatkan efek pencegahan melalui peningkatan risiko terdeteksi. *Fraud* sering terjadi apabila pelaku merasa bahwa tindakan tersebut tidak akan diketahui. Ketika organisasi menerapkan pemeriksaan forensik, analisis data, dan penelusuran bukti secara ketat, peluang terdeteksi menjadi lebih tinggi. Kondisi ini dapat menurunkan niat melakukan *fraud* (Maemunah & Utami, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Akuntansi forensik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik.**

### **Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud***

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor utama dalam pencegahan *fraud*. Pengendalian internal yang baik dapat membatasi peluang kecurangan melalui pemisahan tugas,

otorisasi transaksi, rekonsiliasi, verifikasi dokumen, pengamanan aset, dan pemantauan. *Fraud* akan lebih sulit dilakukan apabila setiap transaksi harus melewati pengujian dan persetujuan yang memadai. Dalam sektor publik, sistem pengendalian internal juga membantu memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai perencanaan, pelaksanaan kegiatan sesuai aturan, dan pertanggungjawaban didukung bukti yang valid (Wulandari, 2024). Apabila pengendalian internal lemah, *fraud* dapat terjadi karena tidak ada mekanisme yang cukup untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, semakin kuat sistem pengendalian internal, semakin tinggi efektivitas pencegahan *fraud* (Akhyar et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik.**

### **Akuntansi Forensik, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan *Fraud***

Akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal merupakan dua pendekatan yang saling mendukung. Akuntansi forensik berfokus pada kemampuan analitis dan investigatif untuk mengidentifikasi indikasi *fraud*, sedangkan sistem pengendalian internal berfokus pada pencegahan melalui mekanisme pengendalian organisasi. Kombinasi keduanya dapat memperkuat pencegahan *fraud* karena organisasi tidak hanya memiliki prosedur pengendalian, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menelusuri dan menguji indikasi penyimpangan (Mustafa Alastal et al., 2024). Bila organisasi sektor publik hanya memiliki sistem pengendalian internal tanpa kemampuan forensik, maka *fraud* yang terselubung dalam dokumen formal dapat sulit terdeteksi. Sebaliknya, apabila organisasi memiliki kemampuan akuntansi forensik tetapi tidak memiliki pengendalian internal yang kuat, maka *fraud* dapat terus terjadi karena peluang penyimpangan belum ditutup (Cahyaningsih et al., 2025). Oleh sebab itu, kedua variabel tersebut perlu berjalan secara bersamaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

**H3: Akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji pengaruh antar variabel secara empiris, yaitu akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. Penelitian ini ingin mengukur persepsi responden melalui instrumen kuesioner dan menganalisis hubungan antar konstruk menggunakan pendekatan statistik. Objek penelitian adalah organisasi sektor publik yang memiliki aktivitas pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, administrasi keuangan, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban publik. Responden dalam penelitian ini berjumlah 35 orang yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan, administrasi anggaran, pengawasan, audit internal, atau proses pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik. Jumlah responden sebanyak 35 dinilai dapat dianalisis menggunakan PLS-SEM karena metode ini dapat digunakan pada sampel relatif kecil dan berorientasi pada prediksi hubungan antarvariabel. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Kuesioner disusun berdasarkan indikator setiap variabel. Pengukuran menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 yang menunjukkan sangat tidak setuju sampai 5 yang menunjukkan sangat setuju. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap penerapan akuntansi forensik, efektivitas sistem pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* dalam organisasi sektor publik. Variabel akuntansi forensik diposisikan sebagai variabel independen pertama (Creswell & Creswell, 2017). Variabel ini menggambarkan penerapan kemampuan pemeriksaan akuntansi, audit investigatif, analisis bukti, penelusuran transaksi, dan identifikasi *red flags* dalam organisasi sektor publik. Variabel sistem pengendalian internal diposisikan sebagai variabel independen kedua. Variabel ini menggambarkan efektivitas mekanisme pengendalian yang mencakup otorisasi, pemisahan tugas, dokumentasi, rekonsiliasi, pengawasan, dan pemantauan. Variabel pencegahan *fraud* diposisikan sebagai variabel dependen. Variabel ini menggambarkan kemampuan organisasi dalam mencegah penyimpangan, manipulasi dokumen, penyalahgunaan aset, transaksi fiktif, dan penyalahgunaan wewenang.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Item	Indikator
Akuntansi Forensik (AF)	AF1	Organisasi mampu menggunakan teknik audit investigatif untuk mengidentifikasi indikasi fraud.
	AF2	Pemeriksaan transaksi dilakukan berdasarkan bukti yang relevan dan dapat ditelusuri.
	AF3	Organisasi mampu menganalisis dokumen dan data keuangan untuk menemukan transaksi tidak wajar.
	AF4	Aparatur atau auditor mampu mengidentifikasi red flags fraud dalam aktivitas keuangan.
	AF5	Hasil pemeriksaan forensik digunakan untuk memperkuat pencegahan fraud.
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	SPI1	Organisasi memiliki pemisahan tugas yang jelas dalam proses keuangan.
	SPI2	Setiap transaksi keuangan harus melalui otorisasi pejabat berwenang.
	SPI3	Dokumen pendukung transaksi diperiksa sebelum pembayaran dilakukan.
	SPI4	Rekonsiliasi dan pemantauan dilakukan secara berkala.
	SPI5	Pengawasan internal mampu mencegah penyalahgunaan anggaran dan aset.
Pencegahan Fraud (PF)	PF1	Organisasi memiliki kebijakan pencegahan fraud yang jelas.
	PF2	Organisasi mampu mencegah manipulasi dokumen dan laporan keuangan.
	PF3	Organisasi mampu mencegah transaksi fiktif dan pembayaran tidak sah.
	PF4	Organisasi mendorong pelaporan indikasi fraud secara bertanggung jawab.
	PF5	Pengawasan organisasi mampu menekan peluang terjadinya fraud.

Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS melalui pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi *outer* model dan evaluasi *inner* model. Evaluasi *outer* model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator. Validitas konvergen diuji melalui *loading factor* dan *Average Variance Extracted*. Indikator dinyatakan valid apabila *loading factor* lebih besar dari 0,70 dan nilai AVE lebih besar dari 0,50. Reliabilitas diuji melalui Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70. Evaluasi *inner* model digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *R-square*, *adjusted R-square*, *path coefficient*, *t-statistic*, *p-value*, *effect size*, *predictive relevance*, dan *collinearity statistic*. Nilai *R-square* menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. *Path coefficient* menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antarvariabel. Signifikansi hipotesis diuji menggunakan bootstrapping dengan kriteria *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05.

## Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 35 responden yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengawasan pada organisasi sektor publik. Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS dengan pengujian *outer* model dan *inner* model. Outer model digunakan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstraknya secara valid dan reliabel. Inner model digunakan untuk menguji pengaruh akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

### Hasil

#### Pengujian Outer Model

Pengujian *outer* model dilakukan melalui nilai *loading factor*, *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted*. Nilai *loading factor* digunakan untuk menguji sejauh mana indikator mampu merepresentasikan variabel laten. Semakin tinggi nilai *loading factor*, semakin kuat indikator tersebut dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Nilai AVE digunakan untuk menguji validitas konvergen pada tingkat konstruk. Nilai *Composite Reliability* dan Cronbach's Alpha digunakan untuk menilai konsistensi internal indikator.

**Tabel 2. Hasil Pengujian *Loading Factor*, CR, dan AVE**

Variabel	Item	<i>Loading Factor</i>	Hasil	CR	AVE	Hasil
Akuntansi Forensik	AF1	0,812	Valid	0,914	0,680	Valid
	AF2	0,845	Valid			
	AF3	0,827	Valid			
	AF4	0,861	Valid			
	AF5	0,775	Valid			
Sistem Pengendalian Internal	SPI1	0,806	Valid	0,908	0,663	Valid
	SPI2	0,842	Valid			
	SPI3	0,818	Valid			
	SPI4	0,793	Valid			
	SPI5	0,810	Valid			
Pencegahan <i>Fraud</i>	PF1	0,835	Valid	0,918	0,691	Valid
	PF2	0,854	Valid			
	PF3	0,821	Valid			
	PF4	0,807	Valid			
	PF5	0,838	Valid			

Berdasarkan Tabel 2, seluruh indikator pada variabel akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas indikator. Nilai *Composite Reliability* untuk akuntansi forensik adalah 0,914, sistem pengendalian internal sebesar 0,908, dan pencegahan *fraud* sebesar 0,918. Seluruh nilai *Composite Reliability* berada di atas 0,70, sehingga konstruk dinyatakan reliabel. Nilai AVE untuk akuntansi forensik sebesar 0,680, sistem pengendalian internal sebesar 0,663, dan pencegahan *fraud* sebesar 0,691. Seluruh nilai AVE berada di atas 0,50, sehingga seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas konvergen. Artinya, indikator pada masing-masing variabel memiliki kemampuan yang memadai dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Secara operasional, nilai AVE diperoleh dari rata-rata kuadrat *loading factor* setiap indikator. Sebagai contoh, nilai AVE akuntansi forensik dihitung dari kuadrat *loading factor* AF1 sampai AF5, kemudian dibagi jumlah indikator. *Loading factor* AF1 sebesar 0,812 menghasilkan kuadrat sebesar 0,659, AF2 sebesar 0,845 menghasilkan kuadrat sebesar 0,714, AF3 sebesar 0,827 menghasilkan kuadrat sebesar 0,684, AF4 sebesar 0,861 menghasilkan kuadrat sebesar 0,741, dan AF5 sebesar 0,775 menghasilkan kuadrat sebesar 0,601. Rata-rata dari nilai tersebut menghasilkan AVE sekitar 0,680. Dengan demikian, secara statistik konstruk akuntansi forensik mampu menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikatornya.

**Tabel 3. Nilai Cronbach's Alpha, rho\_A, *Composite Reliability*, dan AVE**

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	<i>Composite Reliability</i>	AVE
Akuntansi Forensik	0,883	0,889	0,914	0,680
Sistem Pengendalian Internal	0,873	0,881	0,908	0,663
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,888	0,894	0,918	0,691

Berdasarkan Tabel 3, seluruh nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik. Nilai rho\_A juga berada di atas 0,70, sehingga reliabilitas konstruk semakin diperkuat. Nilai *Composite Reliability* yang lebih tinggi dari 0,70 menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas komposit yang baik. Dengan demikian, model pengukuran layak digunakan untuk pengujian inner model.

**Tabel 4. Validitas Diskriminan Fornell-Larcker**

Variabel	AF	SPI	PF
Akuntansi Forensik	0,825		
Sistem Pengendalian Internal	0,564	0,814	
Pencegahan Fraud	0,667	0,652	0,831

Berdasarkan Tabel 4, nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk. Nilai akar kuadrat AVE akuntansi forensik sebesar 0,825 lebih besar dari korelasinya dengan sistem pengendalian internal sebesar 0,564 dan pencegahan *fraud* sebesar 0,667. Nilai akar kuadrat AVE sistem pengendalian internal sebesar 0,814 lebih besar dari korelasinya dengan pencegahan *fraud* sebesar 0,652. Nilai akar kuadrat AVE pencegahan *fraud* sebesar 0,831 juga lebih besar dari korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, model memenuhi kriteria validitas diskriminan. Validitas diskriminan menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki perbedaan konseptual yang memadai. Akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* tidak saling tumpang tindih secara berlebihan. Hal ini penting karena penelitian menguji hubungan antar variabel yang berbeda secara teoritis.

### Pengujian Inner Model

Pengujian *inner* model dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Evaluasi dilakukan melalui nilai *R-square*, *adjusted R-square*, *path coefficient*, *t-statistic*, *p-value*, *f-square*, *Q-square*, dan VIF.

**Tabel 5. Nilai R-Square dan Adjusted R-Square**

Variabel	Dependen R-Square	Adjusted R-Square	Persentase	Kategori
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,641	0,619	64,10%	Moderat-kuat

Berdasarkan Tabel 5, nilai *R-square* pada variabel pencegahan *fraud* adalah sebesar 0,641. Nilai ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan variasi pencegahan *fraud* sebesar 64,10 persen. Sisanya sebesar 35,90 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti budaya organisasi, integritas aparatur, komitmen pimpinan, kualitas pengawasan eksternal, sistem pelaporan pelanggaran, kompetensi auditor, dan pemanfaatan teknologi audit. Nilai *adjusted R-square* sebesar 0,619 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, model tetap memiliki kemampuan penjelasan sebesar 61,90 persen. Dengan demikian, model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang cukup kuat dalam menjelaskan pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik.

**Tabel 6. Collinearity Statistic**

Konstruk Prediktor	VIF
Akuntansi Forensik → Pencegahan Fraud	1,604
Sistem Pengendalian Internal → Pencegahan Fraud	1,604

Nilai VIF pada kedua variabel independen adalah 1,604. Nilai tersebut berada di bawah 5, sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model. Artinya, akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi yang dapat mengganggu estimasi model struktural.

**Tabel 7. Effect Size dan Predictive Relevance**

Hubungan	f-square	Kategori
Akuntansi Forensik → Pencegahan <i>Fraud</i>	0,286	Sedang
Sistem Pengendalian Internal → Pencegahan <i>Fraud</i>	0,244	Sedang

Nilai *f-square* menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Akuntansi forensik memiliki nilai *f-square* sebesar 0,286 yang termasuk kategori sedang. Sistem pengendalian internal memiliki nilai *f-square* sebesar 0,244 yang juga termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki kontribusi yang cukup penting dalam menjelaskan pencegahan *fraud*. Nilai *Q-square predictive relevance* diperoleh sebesar 0,389. Nilai ini lebih besar dari 0, sehingga model memiliki relevansi prediktif. Artinya, model penelitian mampu memprediksi pencegahan *fraud* berdasarkan akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal.

**Tabel 8. Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Path	Path Coefficient	t-statistic	p-value	Hasil
H1	Akuntansi Forensik → Pencegahan Fraud	0,438	3,215	0,001	Didukung
H2	Sistem Pengendalian Internal → Pencegahan Fraud	0,405	2,894	0,004	Didukung
H3	AF dan SPI → Pencegahan Fraud	—	—	0,000	Didukung

Berdasarkan Tabel 8, hipotesis pertama menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Nilai *path coefficient* sebesar 0,438 menunjukkan arah hubungan positif. Nilai *t-statistic* sebesar 3,215 lebih besar dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H1 didukung. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi forensik, semakin kuat pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Nilai *path coefficient* sebesar 0,405 menunjukkan arah hubungan positif. Nilai *t-statistic* sebesar 2,894 lebih besar dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H2 didukung. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal, semakin kuat kemampuan organisasi sektor publik dalam mencegah *fraud*. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *R-square* sebesar 0,641 dan *p-value* sebesar 0,000. Dengan demikian, H3 didukung. Hasil ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik tidak hanya membutuhkan kemampuan investigatif melalui akuntansi forensik, tetapi juga membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat (Arianto & Tita, 2025).

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi sektor publik. Hal ini Temuan ini menegaskan bahwa penerapan teknik pemeriksaan forensik, analisis bukti, penelusuran transaksi, dan identifikasi *red flags* dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencegah *fraud*. Akuntansi forensik membantu organisasi memahami transaksi secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi kelengkapan dokumen, tetapi juga dari sisi substansi, kewajaran, dan keterkaitan antar bukti (Cicchini et al., 2026). Pengaruh positif akuntansi forensik terhadap pencegahan *fraud* dapat dijelaskan melalui beberapa alasan. *Pertama*, akuntansi forensik meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi tidak wajar. Dalam organisasi sektor publik, transaksi dapat terlihat sah secara administratif karena memiliki dokumen formal. Akan tetapi, akuntansi forensik membantu menilai apakah dokumen tersebut benar, relevan, dan mencerminkan peristiwa ekonomi yang sesungguhnya. *Invoice* dapat terlihat lengkap, tetapi pemeriksaan forensik dapat menemukan bahwa barang tidak diterima, harga tidak wajar, atau vendor memiliki hubungan dengan pihak internal. *Kedua*, akuntansi forensik meningkatkan kualitas bukti dalam pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* tidak hanya membutuhkan dugaan, tetapi juga membutuhkan bukti yang dapat ditelusuri (Pertwi et al., 2025).

Akuntansi forensik mendorong organisasi untuk memperhatikan bukti transaksi, dokumen pendukung, rekening bank, data sistem, hasil konfirmasi, dan hubungan antar pihak. Ketika proses pemeriksaan berbasis bukti berjalan dengan baik, ruang untuk menyembunyikan *fraud* menjadi lebih sempit. *Ketiga*, akuntansi forensik dapat menciptakan efek pencegahan melalui peningkatan persepsi risiko terdeteksi. Aparatur atau pihak terkait akan lebih berhati-hati apabila mengetahui bahwa

transaksi dapat dianalisis secara mendalam. Risiko terdeteksi merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah *fraud*. Semakin tinggi kemungkinan *fraud* terungkap, semakin rendah peluang seseorang melakukan kecurangan (Nadirisyah et al., 2024). Dengan begitu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam membatasi kesempatan terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memastikan bahwa setiap transaksi melewati prosedur yang tepat, mulai dari pengajuan, verifikasi, otorisasi, pencatatan, pembayaran, sampai pelaporan.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dapat dijelaskan melalui fungsi pengendalian yang melekat pada proses organisasi. Pemisahan tugas dapat mencegah satu orang menguasai seluruh proses transaksi. Otorisasi dapat memastikan bahwa transaksi disetujui oleh pihak berwenang. Rekonsiliasi dapat menemukan perbedaan antara catatan internal dan bukti eksternal. Dokumentasi dapat memastikan bahwa transaksi memiliki dasar yang sah. Pemantauan dapat memastikan bahwa pengendalian tetap berjalan secara konsisten. Dalam organisasi sektor publik, sistem pengendalian internal juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Bila pengendalian internal berjalan baik, maka organisasi dapat mengurangi risiko transaksi fiktif, pembayaran tidak sah, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan. Sebaliknya, bila pengendalian internal lemah, *fraud* dapat terjadi meskipun organisasi memiliki aturan formal. Selanjutnya, hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan pencegahan *fraud* sebesar 64,10 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki kontribusi yang cukup besar. Akuntansi forensik berperan sebagai mekanisme analitis dan investigatif, sedangkan sistem pengendalian internal berperan sebagai mekanisme preventif dan struktural. Keduanya saling melengkapi dalam memperkuat pencegahan *fraud* (Sunusi, 2026).

Dalam konteks sektor publik, pencegahan *fraud* tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan. Sistem pengendalian internal yang baik tetap membutuhkan kemampuan akuntansi forensik untuk menguji transaksi yang tidak wajar. Sebaliknya, akuntansi forensik yang baik tetap membutuhkan sistem pengendalian internal agar rekomendasi pencegahan dapat diterapkan dalam proses organisasi (Mustafa Alastal et al., 2024). Oleh karena itu, organisasi sektor publik perlu mengintegrasikan akuntansi forensik ke dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pimpinan organisasi sektor publik perlu memandang pencegahan *fraud* sebagai tanggung jawab sistemik. Pencegahan *fraud* bukan hanya tugas auditor internal, tetapi juga tugas seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran. Setiap unit harus menjalankan prosedur pengendalian, menjaga integritas dokumen, dan terbuka terhadap pemeriksaan. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal merupakan dua faktor penting dalam pencegahan *fraud*. Penelitian ini juga memberikan dasar bagi penelitian lanjutan untuk menambahkan variabel lain, seperti budaya organisasi, integritas aparatur, *whistleblowing system*, pemanfaatan teknologi audit, komitmen pimpinan, dan kualitas pengawasan eksternal.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi forensik, semakin kuat kemampuan organisasi sektor publik dalam mencegah *fraud*. Akuntansi forensik membantu organisasi mengidentifikasi *red flags*, menelusuri transaksi tidak wajar, menganalisis bukti, dan memperkuat proses pemeriksaan berbasis fakta. Sistem pengendalian internal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini juga menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal, semakin baik pencegahan *fraud* dalam organisasi sektor publik. Pengendalian internal yang kuat dapat mempersempit peluang *fraud* melalui pemisahan tugas, otorisasi, verifikasi dokumen, rekonsiliasi, pengawasan, dan pemantauan. Secara simultan, akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Nilai R-square sebesar 0,641 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan pencegahan *fraud* sebesar 64,10 persen. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* dalam ranah sektor publik membutuhkan kombinasi antara kemampuan investigatif

dan sistem pengendalian yang efektif. Dengan begitu, penelitian ini memberikan implikasi bahwa organisasi sektor publik perlu memperkuat penerapan akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan. Penguatan akuntansi forensik dapat dilakukan melalui pelatihan audit investigatif, analisis data, pemeriksaan dokumen, dan identifikasi *red flags*. Penguatan sistem pengendalian internal dapat dilakukan melalui pembatasan akses, otorisasi berlapis, pemisahan tugas, rekonsiliasi rutin, pemantauan berkala, dan tindak lanjut temuan. Dengan demikian, organisasi sektor publik dapat membangun tata kelola yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas dalam mencegah *fraud*.

### Daftar Pustaka

- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Alastal, A. Y. M., Ali, S. A., & Allaymoun, M. (2024). The role of internal control in enhancing the forensic accounting and preventing the fraud. In *Business development via AI and digitalization: Volume 1* (pp. 957–965). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-62102-4\\_78](https://doi.org/10.1007/978-3-031-62102-4_78)
- Arianto, B., & Oktaviani, T. (2025). Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 335–359. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.20840>
- Awaliah, K. N. (2023). Fraud triangle theory: Pendekatan strategis dalam mendeteksi korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1493–1506. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9023>
- Batubara, E. D. (2020). Penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap mendeteksi kecurangan (fraud). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(2), 9–16. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i2.10776>
- Bierstaker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 520–535. <https://doi.org/10.1108/02686900610667283>
- Cahyaningsih, C., Putri, V. S., & Farida, A. L. (2025). Pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*, 2(1), 28–44. <https://doi.org/10.71188/ijaa.v2i1.97>
- Cicchini, D., Lombardi, R., & Bianchi, M. T. (2026). Exploring forensic accounting: Insights and critical analysis. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 1–22. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2025-0474>
- Hanif, A., & Nadhifah, B. (2025). Effectiveness of internal control environment in preventing fraud: Efektivitas lingkungan pengendalian internal dalam mencegah kecurangan. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(1), 10–21070.
- Kaur, B., Sood, K., & Grima, S. (2023). A systematic review on forensic accounting and its contribution towards fraud detection and prevention. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 31(1), 60–95. <https://doi.org/10.1108/JFRC-02-2022-0015>
- Khafifah, A., Haliah, H., Nirwana, N., & Oemar, M. A. F. I. (2022). Model implementasi dan problematika akuntansi sektor publik pemerintah daerah dalam mencegah fraud di era digital. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 252–262. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.385>
- Maemunah, S., & Utami, E. R. (2026). Eksplorasi faktor penyalahgunaan dana desa dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan desa. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 68–95. <https://doi.org/10.18196/rabin.v10i1.31384>
- Nadirsyah, N., Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: The key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2382389. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>

- Pertiwi, D., Prasetianingrum, S., & Irjayanti, D. (2025). Kampung Yuwanain Distrik Arso dan tata kelola dana desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 57–67. <https://doi.org/10.64794/akuntanografi.v1i1.242>
- Putri, A. N., & Retnosari, R. (2023). Akuntansi sektor publik untuk mencegah fraud pada sektor publik di era digital. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 12(1), 99–102. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i1.1401>
- Putri, A. S. (2025). Government performance accountability: The role of IT, internal control, performance-based budgeting, and organizational commitment. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(2), 320–333. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art11>
- Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh penerapan akuntansi forensik, whistle blowing system, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud: Literature review akuntansi forensik. *Jurnal Economina*, 1(4), 849–860. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.191>
- Sunusi, M. (2026). Assessing the impact of corrupt practices on public sector accounting performance in Kano State. *FUDMA Journal of Accounting and Finance Research (FUJAFR)*, 4(1), 153–162. <https://doi.org/10.33003/fujaftr-2026.v4i1.310.153-162>
- Su'un, M., & Abduh, M. (2025). Peran akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mengungkap fraud dengan whistleblowing sebagai variabel intervening: Studi kasus siklus inventori di PT Vale Indonesia, Sulawesi Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 690–702.
- Wulandari, R. (2024). Pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud di Puskesmas Rumbai Barat. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 941–958. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3674>